

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### II.1 KAJIAN PUSTAKA

##### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain, dan untuk lebih memahami penjelasan pada bagian penelitian terdahulu ini, penulis membuat semacam tabulasi untuk mempermudah identifikasi persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**

NO	Nama Peneliti/ Judul Penelitian	Temuan	Relevansi
1	Siti Rialatul Ma'rifah, Nawiyanto dan Ratna Endang W (2010-2011). Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.	Berdasarkan temuan dalam penelitian ini yang menjadi pemicu terjadinya konflik yaitu adanya rencana kegiatan kembali pertambangan pasir di Desa Wotgalih. Konflik melibatkan kelompok pro dan kontra tambang. Pihak kontra tambang memandang kegiatan tambang secara ekonomis tidak banyak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sebaliknya, kegiatan tambang di pandang mendatangkan ancaman atas keberadaan mereka karena memunculkan	Ada pun kesamaan dari penelitian yang berjudul "Dinamika Konflik Penambang Pasir dengan Masyarakat Nelayan". Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji adanya rencana kegiatan kembali pertambangan pasir sedangkan dalam penelitian ini adanya konflik disebabkan kerusakan pantai yang mengganggu aktivitas melaut. Relevansi sama-sama menagangkat konflik pertambangan pasir.

		resiko bencana dan kerusakan lingkungan.	
2	Andri Parangin-angin (2013). Konflik Petani Dengan Perhutani (Studi Kasus Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang)	Kesimpulan dari penelitian ini adalah petani yang ada di Desa Genteng membutuhkan tanah untuk bertani karena mereka hanya punya kemampuan bertani untuk menyambung hidup. Perhutani juga bertanggung jawab untuk menjaga hutan agar tetap lestari. Kedua kepentingan ini menjadi sebab konflik antara petani yang ada di Desa Genteng dengan Perhutani.	Perbedaan dari penelitian tersebut adalah di mana konflik terjadi adanya perbedaan kepentingan, sedangkan dalam penelitian ini tidak melihat pada satu poros yaitu pada konflik kepentingan atas lingkungan melainkan pada dampak dari galian pasir yang menjadi penyebab konflik. Relevansi penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat konflik kepentingan atas lingkungan.
3	Fatwa Niluvia. Skripsi "Profil penambang pasir, batu dan pemilik tambang". Jurusan Sosiologi. Universitas Muhammadiyah Malang.	Temuan dari penelitian ini, dalam penjelasannya menjelaskan tentang karakter penambang. Seperti yang di kemukakan bahwa karakter masyarakat penambang adalah pekerja keras, dan berorientasi pada satu tujuan yang dicapainya di mana kesehariannya. Dilengkapi oleh skrup, pacul yang selalu dipegangnya setiap hari.	Perbedaan dari penelitian ini adalah di mana penelitian tersebut mengacu pada satu poros yaitu pada karakter penambang, sedangkan penelitian ini memandang kegiatan pertambangan pemicu terjadinya kerusakan lingkungan dan menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar pantai. Relevansi dari penelitian sebelumnya sama-sama melihat karakter penambang pasir.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Konflik

Pernyataan Dubin bahwa pertentangan/*konflik* adalah sebuah fakta kehidupan sosial yang bandel, jelas dapat dibenarkan. Bahwa sebelumnya kita telah menyatakan dengan tegas bahwa pertentangan/*konflik* sosial itu ada dimana-mana; pernyataan ini sebenarnya adalah salah satu premis analisa kita. Premis ini memungkinkan kita membuat generalisasi selanjutnya, dalam tahun-tahun belakangan ini terdapat sejumlah riset interdisipliner mengenai masalah-masalah pertentangan/*konflik*. Dalam hal-hal tertentu hasil riset ini masih bersifat tentatif; tetapi satu kesimpulan dengan kejelasan yang mengesankan telah menghasilkan: rupanya tidak hanya kehidupan sosial, melainkan di mana saja ada kehidupan, disana ada pertentangan/*konflik* (Dahrendorf 1986:258).

Pribadi ataupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Perasaan peranan memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak berusaha untuk saling menghancurkan. Perasaan tersebut biasanya berwujud amarah dan rasa benci yang menyebabkan dorongan-dorongan untuk melukai atau menyerang pihak lain, atau untuk menekan dan menghancurkan individu

atau kelompok yang menjadi lawan. Pertentangan atau pertikaian (selanjutnya disebut “pertentangan” saja) merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan (Soekanto 1982:91).

Tidak semua konflik yang terjadi baik antarindividu dan antara kelompok satu dengan yang lain selalu dapat dikatakan menimbulkan sisi negatif, melainkan juga memberikan responsif yang positif. Bila konflik yang terjadi di kelompok masyarakat belum saja masih sifat langgeng dengan kata lain belum selesai juga, maka dari masyarakat tadi akan mengalami kejenuhan, pada akhirnya konflik tadi tidak menutup kemungkinan akan damai dengan sendirinya atau dari kelompok masyarakat menemukan solusinya dari pertikaian tersebut.

Masyarakat biasanya mempunyai serana-serana menyalurkan benih-benih permusuhan; alat-alat tersebut dalam ilmu sosiologi dinamakan *safety-valve institutions*. *Safety-valve institutions* menyediakan objek-objek tertentu yang dapat mengalihkan perhatian pihak-pihak yang tertikai agar tersalur ke arah lain. Sudah tentu *safety-valve institutions* hanya serana yang bersifat sementara karena harus diukur sampai dimana kekuatannya yang mengalihkan perhatian. Dengan demikian, tak perlu penyelesaian terhadap sesuatu pertentangan; tujuan utamanya adalah untuk menetralisasi ketegangan-ketegangan yang timbul dari situasi pertentangan tersebut. “*Safety-valve*

*institution*”sangat diperlukan dalam masyarakat yang struktur sosialnya yang tidak elastis(Soekanto 1982:94).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Roucek dan Warren mengenai masyarakat yang heterogen biasanya ditandai dengan kurang dekatnya hubungan antara orang satu dengan yang lain, individu cenderung mencari jalannya sendiri-sendiri, hal ini yang menyebabkan adanya pertikaian antar kedua belah pihak, yang di mana individu satu dengan yang lain memiliki kepentingan,pemikiran yang berbeda. Sejumlah teoretikus formatif telah mengeksplorasi landasan komprehensif tentang konflik, tulisan-tulisan dari Gumpłowicz, Mosca, dan Toynbee menyusun teori tentang transformasi sejarah secara besar yang mengemukakan bahwa konflik dalam dan antar masyarakat dari para elit politik,militer,dan ekonomi merupakan kekuatan penggerak dan pola kebudayaan menyebar sebagai hasil dari kompetisi,konflik,dan penaklukan ini. Marx dan Veblen menambahkan sebuah pengakuan tentang pembagian masyarakat secara ekonomi menjadi kelas-kelas, yang mereka lihat menopang konflik ini(Abdulsyani2002:166).

Berbagai penyebab faktor-faktor konflik, seperti yang dikemukakan oleh Rakhmat ialah sebagai berikut:

- a. Kompetisi adalah satu pihak yang mencoba meraih sesuatu dengan mengorbankan pihak lain.
- b. Dominasi adalah satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar.

- c. Kegagalan adalah menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan.
- d. Provokasi adalah satu pihak sering menyinggung perasaan pihak lain.
- e. Perbedaan Nilai adalah terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah( Ustman 2007:16).

Fungsi dari konflik menurut Lewis Coser (1956) yaitu:

- a. Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar.
- b. Konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut dan solidaritas itu bisa menghantarnya kepada aliansi-aliansi dengan kelompok lain.
- c. Konflik juga bisa menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang terisolir menjadi berperan secara aktif.
- d. Konflik juga berfungsi untuk komunikasi(Raho 2007:83).

## 2. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian pasir dan mineral yang berada di lapisan kulit bumi. Dasar kebijakan di bidang pertambangan adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Fakta yang di Desa Padangdangan sudah melenceng jauh dari yang telah di tentukan dalam UUD dasar kebijakan di bidang pertambangan, hal yang demikian itu adalah menjadi suatu tanggung jawab yang perlu di urus tuntas oleh pemerintah. Jika dibiarkan begitu saja para penambang akan lebih serakah lagi dalam kegiatan penambangan pasir. Dampak yang dari penambangan tersebut dapat merusak konservasi lingkungan yang ada.

### 3. Kebijakan Pertambangan di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alamnya. Terdapat beraneka ragam jenis bahan galian dan mineral yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a) Golongan A atau bahan galian strategis yang termasuk kedalam bahan galian ini yaitu: minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda; uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel, kobalt; timah.
- b) Golongan B atau bahan galian vital yang termasuk kedalam bahan galian ini yaitu: besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng; emas, platina, perak, air raksa, intan; arsen, antimon, bismut; yttrium, rutenium,



- cerium dan logam-logam lainnya; berillium, korundum, zirkon, sirkal kwarsa; kriolit, flourspal, barit; yodium, brom, khlor, belerang.
- c) Golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B, bahan galian ini yaitu: nitra-nitrat, pospa-pospat, garam batu (helite); asbes, talk, mika, garafit, magnisit; yarosit, leusit, tawas (alum), oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, parlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth); marmer, batu tulis, batu kapur, dolomite, kalsit; granit, endesir, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur meneral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang brarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan (Fitra 2013:3).

Ketentuan Pidana UU Minerba yakni dalam Pasal 158 menyebutkan “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 158 merupakan wujud tahapan formulasi dari keseluruhan tahapan untuk operasionalnya kebijakan hukum pidana.Operasionalnya kebijakan hukum pidana masih membutuhkan 2 (dua) tahapan lainnya yakni tahapan aplikasi dan eksekusi.Tahapan aplikasi disini merupakan tahapan pemberian pidana terhadap pelaku PETI berdasarkan Pasal 158 tersebut dan tahapan ekselusi disini sebagai tahapan



pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh hakim (<https://www.linkedin.com>).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 tentang izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C mengatur mengenai setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin dari pemerintah atau pejabat setempat yang berwenang tercantum pada Bab IV Pasal 4, 5 dan 6 pada perda tersebut. Bentuk Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut yakni para penambang yang hampir sebagian besar merupakan warga di sekitar daerah pertambangan pasir tersebut melakukan penambangan pasir maupun galian golongan C lainnya tidak memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Menurut data dari Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara penambangan pasir tanpa izin, sejak Tahun 2010 sampai bulan Januari 2013 terjadi sebanyak 4 perkara. Pada Tahun 2010 sebanyak 1 perkara, Tahun 2011 tidak ada perkara, Tahun 2012 sebanyak 3 perkara dan sampai bulan Januari Tahun 2013 tidak ada perkara penambangan pasir tanpa izin (upnjatim. pdf).

Kasus tambang yang terjadi di negeri ini seperti kasus di Papua perusahaan PT. Freeport. Wilayah operasi freeport Indonesia di Papua merupakan sesuatu salah satu dari wilayah operasi FCX dimana penambang tanpa izin skala kecil (PETI) beroperasi di wilayah konsesi pertambangan atau area pendukungnya. Freeport Indonesia telah mengidentifikasi PETI sebagai salah satu tantangan utama keberlanjutan. Kebanyakan orang yang bekerja PETI adalah orang-orang

luar yang bermigrasi ke daerah itu. Mereka memiliki dan keahlian terbatas dalam beroperasi dalam kondisi berbahaya dan memiliki potensi untuk menciptakan resiko terhadap lingkungan, serta menempatkan kesehatan dan keselamatan mereka sendiri pada situasi beresiko (Soetjipto 2011:45).

Secara ekologis, masyarakat pesisir mempunyai cara kehidupan yang bervariasi, sekurangnya mereka mempunyai alternatif pemanfaatan dua lingkungan hidup: dataran (tanah) dan lautan (air); pada bentuk masyarakat ini, komoditi ekonomi lain selain dari aspek kelautan (mencari ikan dan sumber-sumber alam pantai) merupakan mata pencaharian tambahan, sedangkan pada masyarakat petani darat keadaan ini berlaku sebaliknya, yaitu sektor perikanan adalah sebagai bentuk mata pencaharian tambahan (Moeis 2005:19).

Sesuai dengan definisi konsep di atas, hal itu memberikan banyak kontribusi dalam penelitian ini dan juga mencocokkan dengan apa yang ada di tempat penelitian yaitu tepatnya di Desa Padangdangan khususnya daerah pesisir. Di mana masyarakat pesisir tadi terdapat berbagai macam pekerjaan seperti, ada yang pekerjaannya melaut bagi jaraknya dekat dengan tepi pantai, pedagang dan juga ada yang bercocoktanam bagi yang mempunyai lahan (sawah). Menyikapi hal yang demikian perlu adanya perencanaan bila melihat dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Padangdangan, supaya sumber daya alam tadi masih bisa memberikan manfaat dan juga mensejahterakan masyarakat. Sikap yang perlu kita lakukan terkait hal itu ialah, "Perencanaan, secara teknik,

merupakan suatu prosedur untuk meraih hubungan yang optimal antara tujuan-tujuan dan sumberdaya, termasuk akibat-akibat dari tindakan di masa yang akan datang” (Pusic, 1972) dalam (Suud 2006:91).

#### 4. Beberapa Dampak Negative Akibat Penambangan Pasir

Pertambangan selalu mempunyai dua sisi yang saling berlawanan arah yaitu sebagai sumber kemakmuran kepada masyarakat sekitar sekaligus merusak atas lingkungan sekitar yang sangat potensial. Meninjau kembali atas kasus penambangan pasir yang terjadi di Lumajang juga memberikan dampak positif maupun negatif, terdapat di Desa Padangdangan tentang penambangan pasir akan memberikan dampak negatif apabila tidak terkendali antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan lahan bekas tambang
- b. Merusak lahan pertanian dan perkebunan yang dekat dengan pantai
- c. Terjadi abrasi air laut
- d. Aturan yang dibuat seringkali mengakomodasi beberapa kepentingan bahkan mengabaikan unsur lingkungan
- e. Aturan yang tidak dilaksanakan dengan konsisten
- f. Dalam prakteknya otonomi daerah menyebabkan pertambangan maju pesat dan nyaris tidak terkendali.

## II.2 LANDASAN TEORI

### A. Ralf Dahrendorf

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf sering kali disebut teori konflik dialektik, bagi Dahrendorf masyarakat memiliki dua

wajah yakni konflik dan konsensus kita tidak mungkin mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus, kenyataan ini membawa Dahrendorf kepada tesis penting yang dikemukakannya yakni bahwa distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial yang sistematis, kekuasaan atau otoritas tidak bersifat tetap karena ia melekat pada posisi dan bukan pada pribadi. Jadi orang bisa saja berkuasa atau mempunyai otoritas dalam latar belakang tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu dalam latar belakang yang lain (Raho 2007:77).

Sedangkan menurut Dahrendorf (1959, 1968) otoritas adalah kekuasaan yang didapatkan seseorang bukan dari potensi yang ada dalam diri mereka melainkan kekuasaan yang di dapat dari posisi-posisi yang mereka duduki dengan posisi tersebut maka otoritas atau kekuasaan akan muncul guna menguasai orang lain sehingga kestabilan bisa dicapai. Gambaran mengenai otoritas selalu menyiratkan baik superordinasi maupun subordinasi. Orang-orang yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan para subordinat yakni mereka yang mendominasi karena pengharapan orang-orang yang mengelilingi mereka, bukan karena mereka memiliki sifat-sifat psikologis. Konflik otoritas akan terjadi jika orang-orang yang memegang posisi otoritas dan orang-orang yang memegang posisi subordinasi mempertahankan kepentingan-kepentingan tertentu yang bertentangan dari segi substansi dan arah di sini

kita menjumpai istilah kunci lainnya di dalam teori Dahrendorf mengenai konflik kepentingan(Ritzer2012: 453).

Menurut Dahrendorf, otoritas atau kekuasaan di dalam suatu perkumpulan bersifat dialektik. Dalam setiap perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok penambang atau pemilik lahan dan kelompok nelayan , kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda, yang mana kepala kelompok pemilik lahan tersebut ingin tetap menjalankan produksi sebagai mana semestinya visi dan misi penambangan tersebut, dan masyarakat juga menuntut hak akan lingkungan yang nyaman dan bersih, bahkan menurut Dahrendorf mereka dipersatukan dengan kepentingan yang sama, mereka yang berada di kelompok atas ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka yang berada di bawah ingin supaya ada perubahan (Raho 2007:79).

Esensi kekuasaan yang dimaksudkan oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan Wallace dan Wolf (Susan. 2010:55). Dalam hal ini masyarakat sekitar pantai tersebut yang di eksploitasi baik dari segi lingkungan maupun aspek sosial lainnya, dari segi lingkungan masyarakat tidak diuntungkan dengan pencemaran yang dilakukan oleh penambang pasir tersebut seperti abrasi laut.Kekuasaan penambangan atau pemilik modal tersebut dalam hal ini

digunakan untuk merugikan masyarakat sekitar, jadi dalam pandangan Dahrendorf konflik kepentingan menjadi fakta yang tak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan.

Konflik ini pasti selalu ada dalam setiap kehidupan bersama atau perkumpulan atau negara walaupun mungkin secara tersembunyi, hal ini berarti bahwa legitimasi itu tidak bersifat tetap, selanjutnya Dahrendorf menjelaskan hubungan antara konflik dan perubahan menurut dia konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan, dia mengatakan bahwa sekali kelompok-kelompok yang bertentangan muncul maka mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang terarah kepada perubahan di dalam struktur sosial, jika konflik itu adalah intensif maka perubahan akan bersifat radikal, jika konflik itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan, maka perubahan struktural akan terjadi dengan tiba-tiba (Raho 2007:79).

Otoritas merupakan suatu hak yang dimiliki oleh orang yang berkuasa dalam suatu pemerintahan maupun dalam sebuah wilayah yang digunakan untuk mengatur masyarakat sekitar guna menuju arah yang lebih baik. Dalam hal ini pemerintah yang mempunyai otoritas untuk menghentikan atau menonaktifkan penambang atau pemilik modal tersebut, apabila penambang atau pemilik modal tersebut tidak menjalankan proses galian pasir sesuai dengan peraturan daerah, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki otoritas di sini mempunyai

peran untuk mengendalikan keadaan yang telah terjadi istilah lain adalah masyarakatlah yang mengontrol suatu keadaan dimana dia berada.

Dengan lingkungan yang menjadi aspek penting dalam kehidupan, otoritas pemerintahan yang mampu mengendalikan lingkungan tersebut baik menuju ke arah yang lebih baik ataupun menjadi ke arah yang lebih buruk, kasus yang terdapat di Desa Padangdangan ini sudah mencapai eman tahun terakhir, sampai sekarang masalah mengenai kerusakan lingkungan pantai disebabkan oleh kegiatan galian pasir yang dilakukan oleh pemilik modal atau lahan tersebut belum terselesaikan.

#### B. Thomas F. Homer-Dixon

Peneliti di sini memilih teori konflik karena melihat dari fakta yang ada dilapangan terdapat kegiatan pertambangan.Oleh karena itu, kegiatan pertambangan tadi perlu dikaji karena kegiatan partambangan di Kabupaten Sumenep sering menimbulkan kerusakan daerah pesisir dan membawa mereka untuk berkonflik.Salah satu contoh kerusakan lingkungan di area pamukiman nelayan.Konflik terjadi karena sebagian masyarakat merasa tidak mendapat manfaat kesejahteraan dari keberadaan tambang, melainkan justru mendapatkan dampak negtif yang diterimanya.

Pemilik lahan tambang melibatkan sejumlah kelompok orang yang bisa diajak kompromi dalam malakukan kegiatan pertambangan. Hal itu, sama-sama memiliki kapentingan yang saling menguntungkan satu sama lain. Oleh karena itu, kesejahteraan hanya dinikmati oleh penambang saja, dipihak lain seperti masyarakat nalayan mendapatkan dampaknya. Peneliti



mengambil teori konflik karena tertarik untuk mengetahui sejauhmana teori konflik lingkungan Homer Dixon yang diangkat untuk melihat konflik yang ditemukan pada tempat penelitian.

Kelangkaan lingkungan hidup menimbulkan konflik berintensitas rendah,berkelanjutan,yang mungkin tidak menimbulkan konfrontasi dramatis tetapi dapat melemahkan pemerintah (Homer-Dixon 1995:178) ([http://www.academia.edu/9722203/Isu\\_Kontemporer\\_Hubungan\\_Internasional](http://www.academia.edu/9722203/Isu_Kontemporer_Hubungan_Internasional)).

Mengingat keadaan di suatu negri selalu merupakan kondisi di bawah kekuasaan penguasa tertentu maka pergerakan perlawanan di sini bermakna sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa (penyelenggara kekuasaan yang *depotik* dan tidak disukai rakyat) (Mahardika2000:3).Masalah yang terjadi di Desa Padangdangan juga merupakan bentuk perlawanan sosial yang antara nelayan dengan penambang pasir, tidak dapat dipungkiri bila di dalam sosial terdapat kesenjangan dan kurangnya keharmonisan. Karena itu, dimulai dengan bentuk-bentuk yang merugikan kepada pihak lain, sehingga dapat menimbulkan konflik, baik menifes maupun laten.

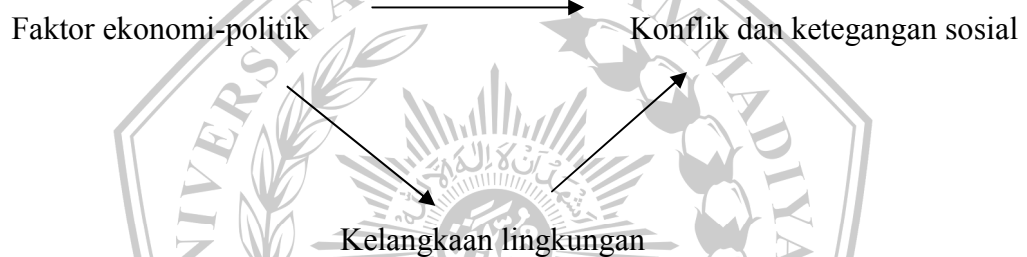
Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan konflik, apa bila sumber daya laut secara ekonomi tidak setara pembagiannya pada masyarakat nelayan. Langkah ini tidak akan dapat terjadi konflik bila pemerintah Desa Padangdangan memiliki ekonomi dan politik kuat dalam mengatur sumber dayayang dikandung laut. Justru sebaliknya, masyarakat akan berkonflik bila ekonomi dan politik lemah, konflik yang terjadi sifatnya

berkelanjutan, selama kerusakan lingkungan menimpa masyarakat nelayan.

Thomas F. Homer-Dixon (1999) menyatakan bahwa ada tiga model mengenai hubungan antara kelangkaan lingkungan (*environmental scarcity*) dengan faktor ekonomi-politik itu (lihat bagan di bawah).

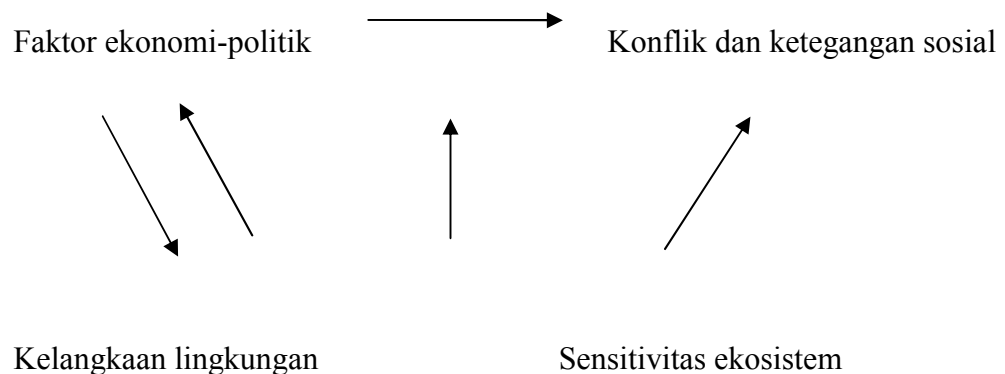
**Gambar 2**

Model I



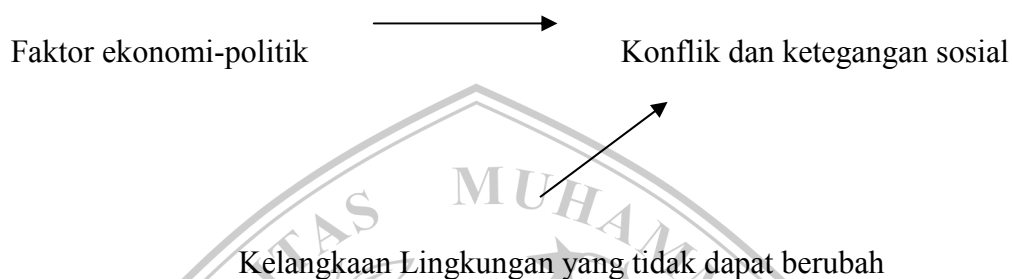
Model I menyatakan bahwa kelangkaan lingkungan dapat dengan sendirinya menjadi kekuatan di belakang perubahan sosial dalam ekonomi dan politik yang mengatur penggunaan sumber daya.

Model II



Model II menyatakan bahwa sensitivitas ekosistem sering menjadi variabel yang menyumbang kelangkaan lingkungan. Sensitivitas ini setidaknya merupakan faktor fisik eksternal bukan fungsi perilaku manusia maupun perilaku lembaga sosial.

### Model III



Sedangkan, Model III, dalam banyak bagian di dunia yaitu kerusakan lingkungan bersilangan dengan sebuah hambatan yang tidak dapat dirubah (*a trehold of irreversibility*). Terlebih, jika perubahan sosial yang mencerahkan menghilangkan sebab-sebab budaya, ekonomi dan politik, maka ia akan menjadi beban yang akan menyusahkan masyarakat (Thomas F. Homer-Dixon, 1999: 104-105)(Rachmad: 19-20).

Di atas telah menyinggung terjadinya konflik itu disebabkan adanya kerusakan lingkungan. Pertama, berangkat dari lemahnya ekonomi masyarakat yang berada di daerah pantai. Kedua, ketidaksetaraan pembagian sumber daya alam yang ada di laut. Sedangkan ketiga, lemahnya peraturan Pemerintah Desa dalam menangani kasus penambangan sumber daya alam yang melahirkan permasalahan konflik internal, antara penambang dengan nelayan.

Tepatnya dari sumbangan Homer-Dixon dari tiga model yang digambarkan di atas, memberi peneliti lebih mudah dalam menganalisis pada lokasi penelitian. Sedangkan ketiga model itu tadi yang lebih cocok untuk dijadikan analisa lokasi lapangan yaitu model I yang menyatakan bahwa kelangkaan lingkungan dapat dengan sendirinya menjadi kekuatan di belakang perubahan sosial dalam ekonomi dan politik yang mengatur penggunaan sumber daya.

Kelangkaan lingkungan atau kerusakan lingkungan dapat menggerakkan masyarakat untuk mencari alternatif lain yang bisa menyokong hidupnya dalam memperoleh kebutuhan kesehariannya. Sedangkan lain hal itu juga, kelangkaan lingkungan adalah pemicu utama akan terjadinya konflik, masyarakat bergerak yang semestinya tidak untuk berkonflik. Mereka tentunya tidak mengarah pada konflik, jika sumber daya laut terbagi sama rata tanpa adanya sepihak yang mementingkan diri sendiri.